

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 284,44 juta pada pertengahan tahun 2025, menjadikannya salah satu populasi terbesar di dunia dengan potensi demografi yang sangat besar untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Jika dikelola dengan baik melalui program pembangunan yang inklusif dan partisipatif, potensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, banyaknya penduduk Indonesia tidak menjamin kesejahteraan yang sama di seluruh lapisan masyarakat. Ini karena dinamika sosial atau ekonomi yang kompleks terus menyebabkan ketimpangan di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan. Kehidupan masyarakat yang makmur di pedesaan menunjukkan bahwa banyak keluarga masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kesempatan finansial, dan jaringan sosial yang penting untuk kemakmuran mereka.

Berdasarkan data Profil Kemiskinan Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS pada Maret 2025, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup signifikan dan cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan (BPS 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di desa masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dalam mendapatkan peluang ekonomi yang setara. Ketidakmerataan tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa pemberdayaan masyarakat prasejahtera, terutama di pedesaan, masih sangat dibutuhkan. Keadaan ini menegaskan perlunya intervensi sosial yang sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan lembaga sosial agar program sosial dapat menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di kota mencapai 6,73% pada Maret 2025, sedikit lebih

tinggi dari 6,66% pada September 2024. Sebaliknya, penduduk miskin di pedesaan turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Dari segi jumlah, penduduk miskin di kota bertambah sekitar 0,22 juta orang, sedangkan penduduk miskin di desa berkurang sekitar 0,43 juta orang (BPS 2025). Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di desa mulai menurun, perbedaan kesejahteraan antara masyarakat kota dan desa. Oleh karena itu, masyarakat pedesaan harus terus diberdayakan agar mereka dapat hidup sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat masih menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Jawa Barat masih berada pada kategori prasejahtera, ditandai dengan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif (Sulistiawati 2022). Masyarakat di wilayah pedesaan Jawa Barat cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan karena bergantung pada sektor informal dan pekerjaan berpenghasilan rendah, serta memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik dan peluang peningkatan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat prasejahtera di tingkat provinsi menjadi penting sebagai konteks awal sebelum mengkaji lebih lanjut kondisi masyarakat prasejahtera di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi pedesaan yang kuat.

Berdasarkan klasifikasi tahapan keluarga sejahtera, Kota/Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ke-6 dalam jumlah keluarga prasejahtera, yang merupakan tahapan awal indikator kesejahteraan keluarga di Jawa Barat. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan menunjukkan variasi kondisi kesejahteraan rumah tangga di berbagai

kabupaten/kota di wilayah ini (BPS 2025). Posisi ini mencerminkan kesulitan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat prasejahtera di Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendapatkan akses ke layanan sosial, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi (Muhtar Amin 2024). Kondisi ini menjadi konteks penting sebelum membahas lebih lanjut tentang kemiskinan dan dinamika masyarakat prasejahtera di tingkat lokal. Akibatnya, intervensi pemberdayaan masyarakat melalui program sosial, seperti yang dilakukan oleh lembaga filantropi, menjadi semakin relevan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera tersebut.

Kemiskinan harus dipahami sebagai fenomena struktural dari sudut pandang sosiologi. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, seperti tidak produktif atau malas, tetapi juga karena cacat sistem sosial yang menciptakan pengaruh ekonomi dan sosial di masyarakat (Rahman et al., 2020). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx, yang menekankan bahwa sistem kapitalisme menciptakan perbedaan antara pemilik modal dan pekerja, yang menyebabkan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan memiliki banyak aspek, dengan akses politik, pendidikan, kesehatan, dan budaya semuanya berkontribusi pada peningkatan perbedaan sosial antar kelas (Rahman et al., 2020). Akibatnya, solusi kemiskinan memerlukan pendekatan sosial yang mendorong partisipasi, solidaritas, dan kemandirian masyarakat, serta kebijakan ekonomi.

Di Indonesia, masalah masyarakat prasejahtera masih sangat kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan dalam lapangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai (Fentiani et al. 2025). Mereka tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, potensi yang dimiliki masyarakat prasejahtera belum dioptimalkan, yang menyebabkan standar hidup mereka rendah. Banyak dari mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti

pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan lainnya, tetapi tidak memiliki kesempatan, dukungan, atau sarana untuk meningkatkannya. Dengan demikian, mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Untuk membuat masyarakat prasejahtera lebih mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya, diperlukan upaya bersama melalui program pemberdayaan, peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan ekonomi yang berkelanjutan (Sari 2024).

Pemberdayaan masyarakat nampaknya menjadi alternatif sekaligus solusi untuk membantu masyarakat prasejahtera menjadi lebih mampu, mandiri, dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diajarkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan meningkatkan peluang ekonomi dan sosial (Mustanir et al. 2023). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari individu hingga kelompok atau komunitas. Pemberdayaan dapat berjalan lebih baik jika banyak pihak terlibat karena masyarakat akan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh sesuai kebutuhan mereka. Pada akhirnya, masyarakat diberdayakan untuk keluar dari kondisi prasejahtera dan terus berkembang dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial di tempat mereka tinggal (Sriati 2022).

Pemberdayaan masyarakat adalah pilar utama pembangunan nasional pemerintah Indonesia karena program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih ada di beberapa wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2025), jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,22 juta orang, atau sekitar 9,3% dari total penduduk (BPS 2025), sehingga pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan langsung, melainkan harus dikombinasikan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada, mendorong usaha kecil, dan meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang (Salsabila et al. 2024).

Pemberdayaan masyarakat dalam implementasinya tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dapat dilaksanakan secara kolektif melalui kelompok, komunitas, maupun lembaga. Pendekatan kelembagaan dalam pemberdayaan memiliki peran penting karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pun bersifat variatif, mulai dari lembaga sosial, lembaga komersial, hingga lembaga filantropi (Bahri and Arif 2020). Di antara berbagai bentuk lembaga tersebut, lembaga filantropi memiliki karakteristik khusus karena berorientasi pada nilai kebermanfaatan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga filantropi yang berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Zakat tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga pada upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Lembaga Rumah Zakat adalah organisasi filantropi internasional yang menjunjung tinggi pemberdayaan profesional dan berkomitmen kuat pada kerja sama kebaikan berkelanjutan. Rumah Zakat, lembaga sosial keagamaan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga tersebut bertujuan untuk menjadi "Lembaga Filantropi global yang mewujudkan masyarakat berdaya melalui kolaborasi kebaikan berkelanjutan." Menurut Rumah Zakat, 2025 Meskipun demikian, tujuan Rumah Zakat adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan profesional dan terpercaya menjalankan program berkelanjutan melalui kerja sama multipihak dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang produktif, adaptif, dan inovatif (Rumah Zakat n.d.).

Rumah Zakat melakukan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan menawarkan modal usaha dan pelatihan, Rumah Zakat membantu masyarakat prasejahtera membangun bisnis mikro dan kecil, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi (Dzulaikah

Azzhara 2023). Lembaga ini memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di bidang pendidikan dan program kesehatan untuk membantu masyarakat tetap sehat. Selain itu, program lingkungan dirancang untuk membangun masyarakat yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Rumah Zakat tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga membantu orang menjadi lebih percaya diri dan kreatif.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pendekatan teori *Sociology of Empowerment* dari Linda Weidenstedt (2017) relevan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses komunikasi sosial yang memungkinkan individu atau kelompok memperoleh kekuatan untuk bertindak melalui relasi partisipatif. Pemberdayaan tidak hanya dilihat sebagai proses pemberian akses terhadap sumber daya tetapi juga merupakan proses yang menciptakan makna, diskusi, dan interaksi. Kedua faktor ini berkontribusi pada pembentukan kemampuan, kemandirian, dan kepercayaan diri masyarakat (Weidenstedt 2017). Perspektif ini sesuai dengan konteks pemberdayaan yang dilakukan Rumah Zakat, yang tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga memungkinkan pendampingan, pengembangan keterampilan, dan penguatan potensi masyarakat yang kurang mampu.

Program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Rumah Zakat menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Program-program seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta pembinaan kelompok usaha telah dilaksanakan sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Rumah Zakat juga memberikan beasiswa serta layanan kesehatan yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Desa Simpang, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan kondisi empiris di lapangan. Desa ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah masyarakat prasejahtera yang cukup signifikan dan mayoritas

penduduknya menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor usaha mikro dan pekerjaan informal.

Desa Simpang, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan akademik serta kondisi empiris yang ditemukan selama penelitian. Desa Simpang merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang menjadi lokasi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, mayoritas masyarakat Desa Simpang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan usaha, seperti keterbatasan modal, kemampuan pengelolaan usaha, serta akses terhadap pengembangan usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, Rumah Zakat melaksanakan program pemberdayaan berupa bantuan modal usaha yang disertai pembinaan dan pendampingan secara rutin, serta Program Desa Ramah Lansia yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang positif terhadap program-program tersebut dan merasakan manfaat berupa bertambahnya modal usaha, meningkatnya pengetahuan dalam mengelola usaha, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Simpang sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk mengkaji kontribusi Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti karena Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia yang dikenal memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti Desa Berdaya, pelatihan ekonomi produktif, bantuan modal usaha, hingga penguatan kapasitas masyarakat. Namun, sejauh mana program-program tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Akibatnya, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana lembaga Rumah Zakat membantu masyarakat prasejahtera melalui program-

programnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kondisi yang ditemukan di lokasi penelitian, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Simpang, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Sebagian masyarakat Desa Simpang masih tergolong masyarakat prasejahtera yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, buruh tani, dan usaha mikro yang memiliki tingkat pendapatan relatif rendah serta tidak menentu.
3. Pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan modal sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.
4. Kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk, masih perlu ditingkatkan.
5. Akses masyarakat terhadap pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha belum merata sehingga tidak semua pelaku usaha memperoleh pembinaan secara berkelanjutan.
6. Sebagian masyarakat, khususnya lanjut usia, masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara rutin.
7. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, serta pemeliharaan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan edukasi dan pendampingan.
8. Pelaksanaan program pemberdayaan Rumah Zakat masih menghadapi beberapa kendala, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sarana pendukung maupun kondisi penerima manfaat yang beragam.
9. Perkembangan usaha penerima manfaat belum merata karena dipengaruhi oleh kemampuan individu, pengalaman berwirausaha, motivasi, serta kondisi pasar yang berbeda.
10. Keberlanjutan program pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif

masyarakat serta dukungan dari pemerintah desa dan berbagai pihak agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.

11. Meskipun Rumah Zakat telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan di bidang ekonomi dan kesehatan, kontribusi program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera masih perlu dikaji lebih mendalam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana program-program pemberdayaan yang dijalankan Lembaga Rumah Zakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi program-program dijalankan Lembaga Rumah Zakat?
3. Bagaimana kontribusi Lembaga Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui program-program pemberdayaan yang dijalankan Lembaga Rumah Zakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi program-program dijalankan Lembaga Rumah Zakat.
3. Untuk mengetahui kontribusi Lembaga Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, sebagai berikut.

1. Secara Ilmiah

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kajian kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini menjadi bahan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran Lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Sosial

- a. Memberikan masukan bagi Lembaga sosial seperti Rumah zakat dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemberdayaan.
- b. Menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan untuk mencapai kemandirian sosial dan ekonomi.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam memahami kondisi masyarakat prasejahtera serta proses pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi Rumah Zakat di Desa Simpang, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat prasejahtera agar mampu mengelola kehidupannya secara lebih baik. Dalam konteks ini, masyarakat prasejahtera umumnya masih menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan struktural yang menyebabkan mereka sulit keluar dari kondisi ketergantungan meskipun memiliki potensi usaha dan sumber daya lokal.

Berdasarkan realitas tersebut, kondisi masyarakat prasejahtera di Desa Simpang diduga masih berada pada tahap keterbatasan kemandirian ekonomi. Masyarakat memiliki potensi usaha mikro, namun belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan modal, rendahnya keterampilan pengelolaan usaha, serta minimnya pendampingan yang

berkelanjutan. Dugaan awal ini didukung oleh data awal lapangan dan hasil wawancara awal yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menjalankan usaha secara tradisional dan belum memiliki perencanaan usaha yang matang. Kondisi ini menjadi titik awal pemikiran dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai kondisi masyarakat prasejahtera di lokasi penelitian.

Dalam kerangka berpikir ini, Rumah Zakat diposisikan sebagai lembaga filantropi yang berperan strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat prasejahtera dengan sumber daya yang tersedia. Rumah Zakat tidak hanya menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga merancang dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM (Rumah Zakat, 2020). Program ini dipahami sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan mengubah pola bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Oleh karena itu, dugaan awal penelitian ini adalah bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat di Desa Simpang telah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, meskipun dampaknya masih berkembang secara bertahap karena program berada pada tahap implementasi awal.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori dari Linda Weidentstedt dalam bukunya *A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change* (2017) tentang pemberdayaan, Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup beberapa dimensi penting, yaitu akses terhadap sumber daya, partisipasi masyarakat, komunikasi sosial, serta kemampuan individu dan kelompok dalam mengambil keputusan. enam dimensi pemberdayaan sebagai landasan analisis, yaitu kewenangan, akses terhadap sumber daya, akses informasi, partisipasi bermakna, partisipasi kolektif, serta orientasi pada dampak dan hasil (Weidentstedt, 2017).

Keenam dimensi ini digunakan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dijalankan dan bagaimana kontribusi Rumah Zakat dapat

dianalisis secara komprehensif. Dimensi pertama, kewenangan, dipahami sebagai kemampuan masyarakat prasejahtera untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Dugaan awalnya adalah bahwa masyarakat telah mulai diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala usaha, meskipun tingkat kewenangan tersebut masih perlu diperkuat.

Dimensi kedua adalah akses terhadap sumber daya, yang mencakup akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, serta jaringan ekonomi. Dalam kerangka berpikir ini, diduga bahwa Rumah Zakat telah membuka akses sumber daya tersebut melalui program UMKM, sehingga masyarakat prasejahtera memiliki peluang untuk mengembangkan usaha. Namun, keterbatasan pengalaman usaha dan manajemen menjadi faktor yang masih membatasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga dampak ekonomi belum sepenuhnya merata.

Dimensi ketiga adalah akses informasi. Akses informasi dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai program, mekanisme bantuan, serta tujuan pemberdayaan. Dugaan awal penelitian ini adalah bahwa keterbukaan informasi dari Rumah Zakat telah mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antar penerima manfaat. Akses informasi yang lebih merata dipandang penting untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat prasejahtera.

Dimensi keempat adalah partisipasi bermakna, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam kerangka berpikir ini, diduga bahwa partisipasi masyarakat telah mulai terbentuk melalui keterlibatan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Partisipasi bermakna dipandang sebagai kunci untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Dimensi kelima adalah partisipasi kolektif, yang menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antaranggota masyarakat prasejahtera. Dugaan awal penelitian ini adalah bahwa program pemberdayaan Rumah Zakat telah mendorong munculnya interaksi dan kerja sama antar penerima manfaat, meskipun bentuk partisipasi kolektif masih perlu diperkuat melalui kegiatan berbasis kelompok dan komunitas. Partisipasi kolektif dipahami sebagai penguat modal sosial yang mendukung keberlanjutan pemberdayaan di tingkat komunitas.

Dimensi keenam adalah orientasi pada dampak dan hasil. Dalam kerangka berpikir ini, diduga bahwa kontribusi Rumah Zakat dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera telah menghasilkan dampak awal seperti meningkatnya motivasi usaha, kesadaran akan pentingnya kemandirian, dan mulai tumbuhnya kemampuan mengelola usaha. Namun, dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan diperkirakan masih memerlukan waktu dan pendampingan yang lebih intensif. Oleh karena itu, orientasi pada dampak dan hasil menjadi dimensi penting untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan mampu menjawab kebutuhan masyarakat prasejahtera.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah mengenai kondisi masyarakat prasejahtera, program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat, serta kontribusi Rumah Zakat dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera di Desa Simpang. Kerangka berpikir ini juga menjadi dasar dalam menganalisis data lapangan berdasarkan Teori Pemberdayaan Linda Weidenstedt, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat tergambar kontribusi Rumah Zakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, dan mandiri.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah peneliti, 2025